

**EVALUASI PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU  
PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) PENINGGILAN 5  
KECAMATAN CILEDUG KOTA TANGERANG**

**TESIS**

**Disampaikan untuk memenuhi persyaratan  
Memperoleh gelar Magister Pendidikan**

**Oleh**

**UMIYATI  
NIM: 1809037130**



**Uhamka**  
SEKOLAH PASCASARJANA

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
2021**

## ABSTRAK

*Umiyati, Evaluasi Peran Komite Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Peninggilan 5 Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA). Tesis. Program Studi Administrasi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.2021*

Komite sekolah memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung. Dari keempat peran tersebut, diharapkan komite sekolah mampu membantu satuan pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan dan mampu melaksanakan pengelolaan pendidikan secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN Peninggilan 5. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif dan model Provus (Ketimpangan dengan membandingkan antara standar yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dan realisasi pelaksanaannya di SDN Peninggilan 5. Teknik pengumpulan data ini melalui wawancara yang mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, ketua komite, guru, dan orang tua peserta didik Sekolah Dasar Negeri (SDN) Peninggilan 5. Analisis data yang digunakan ada tiga langkah yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data yaitu triangulasi sumber data dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung telah dilaksanakan namun maksimal sebagai ditetapkan pemerintah. Sebagai pemberi pertimbangan komite belum terlihat aktif memberikan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan program dan kebijakan sekolah. Sebagai pendukung, Komite Sekolah telah aktif memberikan dukungan terhadap pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun pendanaan, dalam menjalankan perannya sebagai pengontrol terhadap perencanaan dan pelaksanaan program sekolah, laporan hasil pengamatan masih berupa informasi lisan dan insidental. Peran sebagai penghubung sudah cukup baik, namun hubungan kerjasama dengan masyarakat masih kurang. Secara umum komite Sekolah Dasar Negeri (SDN) Peninggilan 5 berperan dalam meningkatkan mutu sekolah dengan membantu moril maupun materiil.

**Kata kunci: Komite Sekolah, Mutu Pendidikan, Peran Komite Sekolah**

## ABSTRACT

***Umiyati, Evaluating the Role of the Committee in Improving the Quality of Education at Peninggilan 5 Public Elementary Schools (SDN), Ciledug District, Tangerang City. Prof. Muhammadiyah University. DR. HAMKA (UHAMKA). Thesis. Educational Administration Study Program, Graduate School, Prof. Muhammadiyah University. DR. HAMKA. 2021***

*The school committee has a role as a provider of consideration, support, controller and liaison. Of the four roles, it is hoped that the school committee will be able to assist the education unit in improving the quality of education and be able to carry out education management efficiently. This study aims to evaluate how the role of the school committee in improving the quality of education at SDN Peninggilan 5. The method used in this research is a qualitative method, with a descriptive approach and a Provus model (inequality by comparing the standards set by the Decree of the Minister of National Education Number 044 / U / 2002 and its implementation in SDN Peninggilan 5. This data collection technique is through in-depth interviews, observation, and documentation study. Interviews were conducted with the principal, committee chairman, teachers, and parents of Peninggilan State Elementary School (SDN) 5 students Data analysis used three steps, namely reduction, data presentation, and drawing conclusions. To check the validity of the data is done by triangulation of data, namely triangulation of data sources and methods.*

*The results showed that the role of the school committee as a provider of consideration, supporter, controller and liaison had been implemented but was maximally determined by the government. As a giver of consideration, the committee has not been seen to be active in providing input and consideration in planning school programs and policies. As a supporter, the School Committee has been active in providing support for the procurement and management of infrastructure, human resources, and funding, in carrying out its role as a controller of the planning and implementation of school programs, reports of observations are still in the form of oral and incidental information. The role as a liaison is good enough, but the cooperative relationship with the community is still lacking. In general, the Peninggilan 5 State Elementary School (SDN) committee plays a role in improving the quality of the school by helping morally and materially.*

***Keywords: School Committee, Education Quality, School Committee Role***

LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU  
PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI PENINGGILAN 5  
KECAMATAN CILEDUG KOTA TANGERANG

TESIS

Oleh

UMIYATI  
NIM 1809037130

Dipertahankan di Depan Komisi Penguji Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
Tanggal 17 Februari 2021

Komisi Penguji Tesis

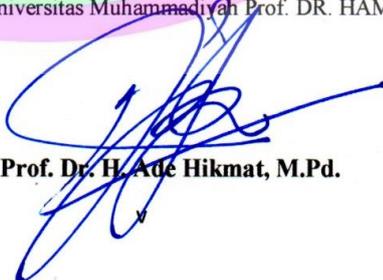
Tanda Tangan

Tanggal

- |  |  |           |
|--|--|-----------|
| 1. Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.<br>(Ketua Penguji)                           |   | 16/3/21   |
| 2. Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.<br>(Sekretaris Penguji)                    |  | 15/3/21   |
| 3. Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.<br>(Anggota Penguji, Pembimbing 1) |  | 14/3-2021 |
| 4. H. Anen Tumanggung, M.A., Ph.D.<br>(Anggota Penguji, Pembimbing 2)          |  | 2/3/21    |
| 5. Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, M.Pd.<br>(Anggota Penguji 1)                      |  | 24/2/21   |
| 6. Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si.<br>(Anggota Penguji 2)                     |  | 24/2-2021 |

Jakarta, .....

Direktur Sekolah  
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

  
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

## DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Penelitian .....	9
1. Fokus Evaluasi .....	9
2. Ruang Lingkup Evaluasi .....	10
3. Ruang Lingkup Masalah Evaluasi .....	10
C. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Evaluasi Program .....	12
1. Pengertian Evaluasi .....	12
2. Pengertian Program .....	16
3. Pengertian Evaluasi Program .....	17
4. Tujuan Evaluasi Program .....	17
5. Prinsip-prinsip Evaluasi Program .....	18
6. Langkah-langkah Evaluasi Program .....	21
7. Kriteria Evaluasi Program .....	23
8. Model-model Evaluasi .....	24
B. Komite Sekolah .....	33

1. Pengertian Komite Sekolah .....	33
2. Peran Komite Sekolah .....	36
3. Pemberdayaan Komite Sekolah .....	49
C. Upaya Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan .....	52
1. Pengertian Mutu Pendidikan .....	52
2. Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan .....	55
D. Hubungan Sekolah dan Masyarakat .....	57
E. Kajian yang Relevan .....	63
F. Sinopsis .....	67
<b>BAB III METODOLOGI EVALUASI .....</b>	<b>70</b>
A. Tujuan Evaluasi .....	70
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	71
1. Tempat Penelitiann.....	71
2. Waktu Penelitian .....	71
C. Metode dan Model Evaluasi .....	72
D. Subjek Evaluasi .....	73
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	74
1. Teknik Pengumpulan Data .....	74
2. Prosedur Pengumpulan Data .....	77
F. Standar Evaluasi .....	78
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	79
<b>BAB IV TEMUAN EVALUASI DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
A. Deskripsi Data .....	80
B. Temuan Evaluasi .....	91
C. Pembahasan .....	100
D. Evaluasi Ketimpangan .....	105
<b>BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Implikasi .....	118

C. Rekomendasi .....	119
Daftar Pustaka .....	120
Lampran-Lampiran .....	124



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya mutu pendidikan. Hal ini bisa dirasakan, yaitu ketika sebuah lembaga pendidikan dalam penyelenggaraannya itu dengan cara yang benar-benar bagus, maka akan dapat dilihat mutunya. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka hasilnya juga biasa-biasa saja.

Pendidikan merupakan salah satu alternatif strategis dalam mencerdaskan bangsa dan modal utama pembangunan suatu bangsa. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas tergantung pada mutu pendidikan. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kotakota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan (Umeidi, 2001: 1).

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa

diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor utama atau penentu bagi masa depan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI no. 20 Th 2003).

Allah juga telah menegaskan dalam firman-Nya Surah Al-Zumar (39 : 9) tentang pentingnya manusia menuntut ilmu, firmanNya yang dimaksud adalah:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

*Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.*

Dalam ayat ini, jelas menunjukkan bahwa Allah memberikan penghargaan yang cukup tinggi terhadap orang yang berakal, berfikir dan berilmu pengetahuan. Sehubungan dengan itu, dalam Al-Quran terdapat juga galakan supaya manusia senantiasa berusaha untuk memperlengkapi diri mereka dengan ilmu pengetahuan. Sebagai contohnya, firman Allah SWT dalam Surah Al-Mujadah (58 : 11) yaitu:

فَأَنشُرُوا اللَّهَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*"Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan."*

Namun demikian, saat ini salah satu masalah mendasar dalam pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan diberbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Hal ini yang menyebabkan rendahnya sumber

daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Mutu pendidikan di Indonesia selama ini masih belum mengalami peningkatan yang signifikan dan merata. Pada sekolah yang terletak di kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Pendidikan berkualitas masih merupakan barang mewah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Mengenai penyebab lebarnya kesenjangan mutu pendidikan nasional, Connie Chairunnisa dan Pudjosemedi dan bukunya. Manajemen Pendidikan menyatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan lebarnya kesenjangan mutu pendidikan nasional, tiga di antaranya adalah:

1. Penerapan pendekatan sistem secara parsial,
2. Belum maksimalnya penerapan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah),
3. Rendahnya partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah. (Chairunnisa & Pudjasemedi, 2013)

Faktor pertama, sekolah sebagai sistem terdiri dari *konteks*, *input*, *proses*, *output*, *outcome*. Dalam kenyataannya, pengembangan sekolah sering difokuskan pada *input* saja (guru, kurikulum, sarana prasarana, dana, dsb), *proses* saja (proses belajar mengajar, penilaian hasil belajar, kepemimpinan sekolah, dsb), atau *output* saja (nilai ujian nasional, perlombaan karya ilmiah, dsb). Padahal, penyelenggaraan sekolah harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh.

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara birokratik-sentralistik telah menempatkan sekolah sangat tergantung pada keputusan

birokrasi di atasnya yang kadang-kadang kurang sesuai dengan kondisi sekolah. Hal ini membuat sekolah kehilangan kemandirian dan daya kreatifitasnya.

Faktor ketiga, peran serta warga sekolah khususnya guru, karyawan dan siswa serta peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa masih belum optimal. Padahal keberhasilan sekolah memerlukan kerjasama dengan semua pihak termasuk masyarakat. Partisipasi maksimal akan mampu meningkatkan rasa kepemilikan terhadap sekolah yang tentunya akan meningkatkan dedikasi dan mutu sekolah.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan sumber daya manusia. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, terarah, dan intensif sehingga mampu menyiapkan bangsa memasuki era globalisasi yang sarat persaingan. Mutu pendidikan diarahkan oleh Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Kesadaran pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan kurikulum, sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Pemerintah dengan kebijakannya bertanggung jawab dalam upaya peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan.

Selain usaha-usaha di atas, kebijakan seperti halnya otonomi daerah telah menghasilkan pergeseran dalam mengelola persoalan-persoalan pendidikan. Pergeseran

yang dimaksud adalah bahwa system manajemen pendidikan yang semulasentralistik menjadi desentralistik.

Kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dalam tanggung jawab pembangunan di berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga diberikan kepada satuan pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten kota, sekolah, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah maka sebagai realisasi dari peran serta masyarakat di bidang pendidikan diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah wadah yang bernama Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah/Madrasah di tingkat satuan pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari Undang-undang tersebut diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah

memposisikan Kabupaten/Kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada Kabupaten/Kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dengan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan.

Dalam Islam orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanan kepada Allah SWT. Fitrah ini merupakan kerangka dasar operasional dari proses penciptaan manusia.

Berikut ini ayat yang menunjukkan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan:

Q.S.At-Tahrim (66 : 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."* (Q.S. at-Tahrim ayat 66:6).

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: "Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS.Al-Anfal ayat 28).

Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau *stakeholder* pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, masyarakat atau *stakeholder* lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Komite Sekolah yang dibentuk untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah berperan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Komite itu dibentuk untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para *stakeholder* sekolah untuk turut merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka. Komite juga mewadahi partisipasi para *stakeholder* untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya.

Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan sekolah.

Berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 terlihat bahwa komite

mempunyai peran yang sangat strategis, karena komite sekolah berperan sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan; badan pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; badan pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan serta mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat dilingkungan satuan pendidikan.

Untuk melihat lebih jauh kondisi di lapangan penelitian mengadakan studi pendahuluan tentang keberadaan komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri Peninggilan 5 Ciledug. Dari hasil studi pendahuluan diketahui bahwa sebagai badan yang mewakili masyarakat, komite sekolah belum berperan optimal. Mereka belum mempunyai program kerja sendiri yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan fungsi dan perannya secara mandiri dan professional. Pada prinsipnya mereka masih sebatas melaksanakan program untuk mendukung program yang ditetapkan oleh sekolah, terutama terkait dengan pendanaan. Sebagian orang tua siswa dan masyarakat menganggap keberadaan komite sekolah sebagai juru bicara sekolah dalam mensukseskan program-program sekolah.

Manajemen pendidikan berbasis sekolah masih terbatas dipahami oleh kalangan tertentu saja (sebagian personil sekolah). Anggota komite sekolah pada umumnya adalah warga masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Mereka hanyalah orang-orang yang dianggap dapat diajak bicara tentang sekolah dan mungkin dapat mencari jalan keluar jika sekolah memerlukannya.

Sedangkan yang berkaitan dengan kebijakan sistem pendidikan secara nasional, seperti dalam hal penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah, pemahaman mereka masih sedikit. Selain itu sebagian dari pengurus komite sekolah adalah orang-orang yang memiliki kesibukan masing-masing sehingga waktu untuk memikirkan kemajuan sekolah sangat sedikit.

Selain itu pemahaman sebagian guru dan warga sekolah tentang peran komite baru masih minim. Mereka masih berpikir dengan paradigma lama dimana fungsi dan peran komite sebatas untuk mencari dan menghimpun dana untuk kepentingan meningkatkan mutu sekolah. Komite sekolah yang ikut andil dalam proses pengelolaan pendidikan di sekolah dianggap mengganggu dan bertindak berlebihan.

Melihat realitas tersebut peneliti merasa perlu mengevaluasi bagaimana pelaksanaan peran komite di Sekolah Dasar Negeri Peninggilan 5 dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu, peneliti mengangkat permasalahan dengan judul “PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI PENINGGILAN 5 CILEDUG”.

## **B. Masalah Penelitian**

### **1. Fokus Evaluasi**

Fokus penelitian ini antara lain tentang peran serta komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

- 1) Peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah.
- 2) Peran komite sekolah sebagai badan pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan.

- 3) Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah.
- 4) Peran komite sekolah sebagai badan mediator antar pemerintah dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan..

## 2. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memfokuskan evaluasi lebih dan hanya mencakup tentang komite sekolah dan pelaksanaan peran-peran seperti yang tercantum dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yaitu sebagai Badan Pertimbangan, Pendukung, Pengontrol dan Penghubung (*Mediator*) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Peninggilan 5. Peneliti juga melakukan evaluasi tentang faktor-faktor pendukung yang dapat meningkatkan peran komite dalam menjalankan tugasnya dan hambatan-hambatan yang dihadapi komite sehingga perannya menjadi kurang maksimal.

## 3. Ruang Lingkup Masalah Evaluasi

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka permasalahan dalam evaluasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan Pemberi Pertimbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Peninggilan 5?
2. Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan pendukung meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Peninggilan 5?
3. Sejauh mana komite sekolah menjalankan perannya sebagai badan pengontrol

dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Peninggilan 5?

4. Sejauh mana komite sekolah menjalankan perannya sebagai mediator antar pemerintah dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Peninggilan 5?

### C. Kegunaan Hasil Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Peninggilan 5.

#### 2. Secara praktis

- 1) Peneliti mendapatkan pengalaman didalam mengkaji peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- 2) Diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan kajian bagi semua pihak terutama bagi pihak sekolah itu sendiri dan juga bagi komite sekolahnya.

## Daftar Pustaka

- Ahmadi, A., & Uhbiyati, N. (2001). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S., & Jabar, C. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bedjo, S. (2007). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Jakarta: Sagung Seto.
- Briekerhoff, R. et.-al. (1983). *Program Evaluation. A Source Book*. Boston: Kluwer Nijboff Publishing.
- Chairunnisa, C., & Pudjasemedi. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Ukamka Press.
- Daryanto, H. M. (2005). *Adminstrasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ghani, A. R. (2014). *Metode Penelitian Tindakan Sekolah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Isjoni. (2006). *Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Isra, M. W. (2012). *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pedidikan di SDIT Raudhatul Muttaqim Pondok Gede*. Jakarta: UHAMKA.
- Janatun, T. (2015). *Evaluasi Peran Komite Sekolah Dalam Pelolaan Mutu Layanan Pendidikan Di Madrasah Aliah 11 Jakarta*. Jakarta: UHAMKA.
- Khusnuridlo. (2010). *Prinsip-prinsip Evaluasi Program Supervisi Pendidikan (Online)*. Retrieved from <http://www.khusnuridlo.com> 20 Desember 2020
- Kompri. (2015). *Manajemen Pendidikan 2*. Bandung: Alfabeta.
- Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002, *Penduan*

*Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, hal. 121

Latifah, E. (2012). *Peranan Komite Sekolah Dalam Mengimplementasikan Manajemen berbasis Sekolah Pada MTs Negeri Subang*. Jakarta: UHAMKA.

Meirawan, & Rahadi. (2006). *Pemerdayaan Komite Sekolah: Modul 1: Penguatan kelembagaan Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.

Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Suprayekti, & Fathia, F. (2015). *Evaluasi Program*. Jakarta: Lembaga Pengembangan UNJ.

Mulyasa. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyatiningsih, E. (2011). *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*. Yogyakarta: UNY Press.

Mulyono, W. D. (2014). *Jurnal Peran Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur*. *Jurnal Pendidikan Vokasi*.

Nanang, F. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Bani Qurasy.

Norkhalisah, Amanda, P. N., & Dayanti, R. (2020). *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Di Sekolah Inklusi SDN Sungai Andai 3 Banjarmasin*. *Jurnal Manajemen Kelompok 9-1.docx Version.1*.

Pohan, M. M. (2018). *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. *Jurnal ANISIRU PAI, Vol. 2 No. 2*, 97-106.

Rahma S., D. (2014). *Pemberdayaan Komite Sekolah Dalam Rangka Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rangkas Bitung Lebak Provinsi Banten*. Jakarta.

Sidi, I. J. (2001). *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru*

*Pendidikan*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Sofiah, Y. (2017). *Evaluasi Terhadap Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Jakarta*. Jakarta: UHAMKA.

Stufflebeam, D., & Shinkfield, A. (2007). *Evaluation Theory, Models and Application*. San Francisco: Jossey Bass.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sulasmono, B. S., & Murjini. (2017). Evaluasi Kinerja Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Cakrawala Pendidikan, Februari 2017, Th. XXXVI, No. 1*, 113-121.

Syaiful, S. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat, Strategi Menenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta: PT. Nimas Multima.

Tayibnapis, F. Y. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. (2007). *Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. (2003). *Acuan Operasional Kegiatan dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Triatna, C. (2015). *Pengembangan Manajemen Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. hal. 156

Pratiwi, I. A., & Hamidsyukrie, Z. M. (2016). Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Se-

Kecamatan Cakranegara. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Vol. 1*, 91-98.

Widyoko, E. P. (2013). *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

